

Refleksi Eksistensi Petani dalam Panggung Sejarah Indonesia

Yandi Syaputra Hasibuan,¹ Arkini Sabrina^{1*}

¹Alumnus Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: yandihhasibuan17@gmail.com,* arkinisabrina11@gmail.com

*Korespondensi



Received: 03-02-2024, Revised: 06-05-2024, Accepted: 09-05-2024, Published: 29-05-2024

Abstrak

Tulisan ini mengangkat persoalan terkait eksploitasi petani secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia. Makalah ini menggunakan metode sejarah. Keberadaan petani dipandang sebelah mata karena hanya sekedar figuran atau lebih tepatnya bahan eksploitasi kolonial Belanda dan Jepang, baik untuk kepentingan ekonomi maupun politik. Nasib tersebut kemudian tiba-tiba berubah karena para petani tergabung dalam kelompok partai politik dan menjadi organisasi, seperti Pertanu, STTI, BTI, dan lain sebagainya. Sayangnya, euforia mendukung petani tidak berjalan mulus karena terjadi bentrokan dengan masyarakat sipil dan pihak yang tidak seideologi. Hasilnya adalah pertumpahan darah antar anggota bangsa; ini sungguh ironis. Sampai saat itu, Orde Baru lahir dan segala bentuk organisasi yang berhubungan dengan petani dikomunisasi.

Kata Kunci: eksistensi; petani; refleksi

Abstract

This article raises issues related to the overall exploitation of farmers in various regions in Indonesia. This paper uses historical methods. The existence of farmers was underestimated because they were merely extras, or more precisely, material for Dutch and Japanese colonial exploitation, both for economic and political interests. This fate then suddenly changed because farmers had joined political party groups and become organizations, such as Pertanu, STTI, BTI, and so on. Unfortunately, the euphoria to support the peasants did not run smoothly because there were clashes with civil society and with those who did not share the same ideology. The result is bloodshed between members of the nation; this is truly ironic. Until then, the New Order was born, and all forms of organizations related to farmers were communized.

Keywords: existence; farmer; reflection



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejak diterbitkannya disertasi Sartono Kartodirdjo tentang pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 telah membuka mata para sejarawan bahwa sejarah juga digerakkan oleh orang-orang kecil, misalnya petani. Petani merupakan sebuah identitas yang disematkan kepada individu, barangkali aktivitasnya setiap hari bergumul di atas tanah, seperti menanam padi, jagung, palawija dan lain-lain. Sayangnya, hasilnya itu seringkali bukan untuk petani melainkan untuk pihak yang

berkuasa. Dalam catatan sejarah Indonesia, pola ini bukanlah wacana baru, jika para pembaca sering melihat eksploitasi petani oleh tuan tanah dengan cara yang tidak manusiawi, itu merupakan produk dari masa lampau yang terus menggelinding hingga masa sekarang.

Sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) runtuh pada akhir Desember 1799, Belanda mulai mengklaim bahwa Nusantara (Indonesia sekarang) merupakan wilayah jajahannya, terkhusus di Pulau Jawa. Eksploitasi kepada petani dilaksanakan secara intensif pada masa van den Bosch dengan mengintroduksi politik *cultuur stelsel* pada tahun 1830 untuk memperoleh keuntungan dari wilayah jajahan. Eksploitasi terhadap petani sangat memprihatinkan, tidak diketahui pasti berapa jumlah orang yang meninggal dunia akibat kebijakan ini. Pada tahun 1870 kolonialisme Belanda kembali mengeluarkan kebijakan Undang-undang Agraria dan Gula (*Agararische en Suiker Wet*), dalam hal ini setelah petani sudah tidak mempunyai lahan untuk bertani, mereka kemudian ditransformasikan menjadi buruh industri perkebunan di seluruh wilayah jajahan Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia khususnya petani, berekspektasi positif bahwa Jepang adalah saudara tua yang nantinya akan membebaskan mereka dari belenggu kenestapaan ini. Ternyata ekspektasi tersebut berbanding terbalik, petani kembali menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi. Aiko Kurasawa mencatat di Jawa petani diwajibkan untuk melakukan “wajib serah padi” kepada bupati setempat untuk diteruskan kepada Jepang. Bahkan di wilayah Sumatera Timur juga ketika masa pendudukan Jepang, seluruh lahan sampai di daerah pinggiran jalan para petani ditekan untuk melakukan penanaman padi serta merubah jenis tanaman perkebunan dengan tanaman padi untuk kepentingan ekonomi perang Jepang.

Dalam era kemerdekaan petani mempunyai kedudukan yang lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Fenomena ini dapat dikonfirmasi ketika masing-masing partai politik mulai membentuk masing-masing kelompok petaninya, seperti Masyumi (STTI), NU (Pertanu), PNI (PETANI), PKI (BTI) dan lain-lain. Setiap organisasi petani memiliki ciri khas masing-masing, salah satu contoh BTI *underbow* PKI melaksanakan salah satu program okupasi tanah bekas industri perkebunan tujuannya supaya tidak terjadi ketimpangan dalam kepemilikan lahan pada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, artikel ini mengangkat eksistensi petani di Indonesia secara singkat pada setiap lintasan zaman dengan menekankan praktik eksploitasi yang dilakukan kepada mereka setiap periodenya.

Metode

Makalah ini menggunakan metode sejarah, sumber-sumber yang digunakan, antara lain: *Koran Waspada Medan*, *Koran Harian Rakyat*, *Koran Sumatera*, jurnal, dan beragam literatur pendukung lainnya. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Kantor Harian Waspada, Situs Delpher.nl Beberapa sumber yang digunakan pada artikel ini tentu tidak secara pasti bersifat objektif, misalnya *Koran Harian Rakyat* yang mempunyai kecenderungan membela petani dan buruh. Di sinilah terlihat kejelian dan kecermatan sejarawan dalam penggunaan sumber. Demikian halnya, sumber-

sumber lain baik itu primer maupun sekunder sejarawan dituntut untuk tetap kritis dalam menghasilkan karya sejarah yang bersifat ilmiah (Kuntowijoyo, 2007, p. 27).

Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara maritim juga memiliki wilayah agraris secara geografis, didalamnya petani mengambil peranan penting dalam panggung sejarah. Sejak Van Hogendorp mendeklarasikan negara Hindia-Belanda tahun 1800, maka proses kolonialisme yang sesungguhnya baru dimulai. Bagi sebagian sejarawan era ini juga disebut merkantilisme, setelah VOC bangkrut, sistem kolonial pun lahir untuk mengakuisisi wilayah Nusantara. Kolonial Belanda harus mengatur sistem yang sudah pernah ia jalankan sebelumnya. Karena begitu maraknya masalah yang dihadapi, seperti Perang dengan Belgia, Gerakan Paderi di Sumatera Barat, dan Perang Diponegoro yang menguras dompet kolonial. Akhirnya mereka mencari akal untuk menutupi semua hal ini. Lewat Van den Bosch pada tahun 1830 ia menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) lagi-lagi yang dikorbankan adalah kaum tani. Sistem tanam paksa ini salah satunya untuk menanam kopi di Priangan, Jawa Barat, petani diharuskan menanam kopi, teh, dan kakao dalam jumlah tertentu lalu hasilnya kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru dunia, mengingat saat itu kopi begitu diminati di pasaran dunia (Breman, 2015, p. 143). Namun, perlu diperhatikan juga bahwa sejak zaman VOC wilayah Priangan telah dieksploitasi terlebih dahulu yang dikenal sebagai *Prenger Stelsel*. Kembali, kebijakan *cultuurstelsel* diperkirakan menelan korban ribuan petani akibat kerasnya sistem tanam paksa. Secara lebih rinci berikut aturan-aturan sistem tanam paksa:

1. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk *cultuurstelsel* tidak melebihi 20 persen atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis komoditas primadona di paran dunia.
2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk sistem tanam paksa dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak
3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Hindia-Belanda atau pabrik milik pemerintah Hindia-Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
4. Waktu melaksanakan *cultuurstelsel* tidak boleh melebihi jangka waktu menanam padi atau tiga bulan.
5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.
6. Kerusakan atau paceklik bukan karena kelalaian petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung oleh pemerintah Hindia-Belanda.
7. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa akan diberikan kepada kepala desa setempat sebagai perantara.

Bila dicermati seluruh peraturan tentang tanam paksa tidak ada satu pun yang menguntungkan kaum tani, justru sebaliknya semuanya menindas yang lemah. Tidak memungkiri pula bahwa banyak lahan pertanian yang diambil secara paksa oleh pihak kolonial untuk ditanami komoditas primadona, seperti kopi, teh, maupun kakao di berbagai wilayah Indonesia. Dalam aspek lain jika terjadi gagal panen di luar bencana alam yang akan menanggung segala konsekuensinya adalah kaum tani itu sendiri. Dalam catatan Berger, keuntungan netto yang diperoleh oleh kolonial Belanda dari sistem tanam paksa ini lebih dari 100 juta gulden di samping biaya-

biaya perang yang selama ini mereka habiskan untuk kebutuhan perang (Burger, 1957, p. 67).

Kebijakan lain kolonial Belanda yang semakin menyayat hati kaum tani ialah Undang-undang Agraria dan Gula (*Agararische Wet en Saka Wet*) tahun 1870. Maksud dan tujuan penerapan undang-undang ini ialah untuk meliberalisasi perekonomian Hindia Belanda (Leirissa, et al., 2017, p. 21). Bentuk masuknya modal-modal asing ini direalisasikan berupa industri perkebunan. Umumnya setiap aktivitas industri supaya dapat berdiri tegak didasari atas tiga syarat, yaitu: lahan, alat produksi, dan buruh/tenaga kerja. Pada syarat yang terakhir sebagian besar buruh perkebunan didominasi orang-orang yang sebelumnya berprofesi petani (Pelzer, 2016, p. 61). Petani yang sudah beralih profesi ini menjadi buruh perkebunan ini mengalami hari-hari yang panjang dalam profesi barunya, terkhusus buruh lokal (Minasny 2022, 272). Kesewenang-wenangan ini membuat para kuli melarikan diri dari perkebunan. Ada yang lolos, ada yang tidak, bagi mereka yang lolos melanjutkan hidupnya sesuai kemampuannya. Sementara bagi yang tertangkap oleh petugas perkebunan akan disiksa, dicambuk, dijemur di bawah matahari dan ini disaksikan oleh semua orang-orang perkebunan untuk memukul psikis para kuli lainnya bila mereka berniat melarikan diri, nasib mereka tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka saksikan saat itu (Breman, 2015, p. 61).

Pada abad 20, para alumni politik etis mendirikan bermacam-macam organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Partai Komunis Hindia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, PNI dan lain sebagainya. Memang organisasi ini lebih canggih dalam mengorganisir petani untuk menentang kaum kolonial (Ruth, 2022). Partai Komunis Hindia (PKI) mengorganisir petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Namun, pemberontakan ini tidak berjalan lancar karena kurang komunikasi antar tokoh-tokoh PKI sehingga pemberontakan ini terjadi secara sporadis dan gagal. Para pemimpin pemberontakan kemudian ditangkap dan dibuang ke Digul (Ruth, 2022, p. 428).

Tidak ada yang mengubah nasib petani selama berabad-abad di Indonesia, sampai kemudian Jepang menginvasi Indonesia sejak bulan Maret 1942. Bagi kaum tani ekspektasi mereka menunjukkan bahwa ini pertanda baik karena nasib akan berubah di tangan saudara tua (Jepang) mengingat bahwa ada isu invasi ini berorientasi pembebasan orang-orang Asia atas dominasi Barat (Kurasawa 2016). Dengan demikian, hampir seluruh wilayah Indonesia yang diusung oleh Belanda sudah jatuh ke tangan Jepang (Alfian, 2016, p. 201). Perlu diketahui pula secara struktur pemerintahan Jepang tidak terlalu banyak membuat pembaharuan. Hanya saja mereka membentuk organisasi-organisasi tertentu untuk memobilisasi massa untuk kebutuhan perang yang sedang berlangsung.

Awalnya memang Jepang bersikap ramah terhadap rakyat Indonesia, contohnya boleh menyanyikan lagu Indonesia raya, boleh berbahasa Indonesia, dan bendera Indonesia pun dikibarkan. Namun, sikap ramah ini hanya berjalan sementara waktu, setelah itu Jepang menunjukkan watak aslinya sebagai "saudara tua kejam". Hal ini dicatat oleh salah seorang Sosiolog ternama Indonesia Selo Soemardjan. Kedatangan Jepang disambut hangat oleh rakyat Indonesia, sebagai saudara tua. Jepang di masa awal pendudukan bersikap ramah kepada rakyat Indonesia. Ternyata itu semua hanya kamuflase belaka, supaya kedatangan mereka tidak dicurigai. Jepang memobilisasi rakyat di pedesaan Jawa untuk menduduki

tanah-tanah partikelir, perkebunan milik asing, dan tanah hutan kemudian menggarap tanah-tanah tersebut menjadi lahan pertanian (Ricklefs, 2019, p. 211).

Setelah itu tindakan-tindakan kasar seperti menendang, memukul, menunjang dan tindakan tidak terpuji lainnya sudah menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia, bila tidak mengerti instruksi dari pihak Jepang. Tindakan keras ini sering dialami, rakyat kalangan bawah, tidak terkecuali petani yang sudah tahan uji terhadap siksaan fisik (Koyagi, 2013). Semenjak itu ekspektasi petani terhadap Jepang salah, bahwa sebelum dan di awal kedatangan Jepang dianggap sebagai saudara tua pembebas dari segala duka nestapa yang dialami masa kolonial. Faktanya bahwa pendudukan Jepang tidak kalah ganasnya dengan Belanda mengenai eksploitasi kaum tani bermula dari April 1943 pasar bebas dilarang karena aktivitas perang, akibatnya petani diharuskan menanam dan menyerahkan padi dalam jumlah tertentu untuk kemudian diserahkan kepada Jepang. Padi yang diserahkan akan digiling dan didistribusikan kepada tangan Jepang (Koyagi, 2013, p. 318).

Menjadi perhatian pula, penyerahan padi ditetapkan oleh pemerintah pusat, kira-kira pembagiannya sebagai berikut:

1. Petani diharuskan menjual hasil pertanian kepada Jepang sejumlah kuota tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, misalnya Jepang membutuhkan satu ton padi dan harganya sekitar 1.000 Gulden/Yen. Nah, jumlah itu harus pasti satu ton dan harganya tidak lebih dari 1.000 Gulden/Yen, padahal harga sebenarnya mungkin 10 kali lipat dari harga yang ditetapkan Jepang.
2. Padi harus diserahkan ke penggilingan beras yang sudah ditunjuk pemerintah desa.
3. Apabila petani masih memiliki surplus untuk dijual, setelah menyerahkan kuota yang ditetapkan, mereka hanya diperbolehkan menjualnya ke penggilingan terdaftar dan tidak diizinkan untuk menjualnya kepada tengkulak atau ke pasar setempat. Dilarang menumbuk padi gabah untuk kepentingan komersial tanpa izin pemerintah (Kurasawa, 2016, p. 201).

Selanjutnya Jepang juga membentuk Taman Latihan Pemuda Tani (Talapeta) di Sumatera Timur demi mempersiapkan diri dalam perang gerilya, jika seandainya musuh mendarat secara tiba-tiba. Talapeta diberi latihan militer dan bercocok tanam serta cara-cara sabotase dan melenyapkan kaki tangan musuh. Organisasi lebih berfokus perekrutannya kepada kawula muda untuk kepentingan perang dan hanya ada di Sumatera, sedangkan di Jawa yang mirip ini ialah Heiho. Umumnya yang terkena dampak kebijakan Jepang ini petani kecil, mereka menderita kemiskinan yang kronis, dan hampir selalu terlibat utang, serta terikat sistem ijon. Dengan adanya hal ini, mereka tidak memiliki kontrol penuh atas hasil mereka sendiri. Setelah mereka membaya utang dalam bentuk padi yang dipanen, biasanya hanya sedikit yang tertinggal di tangan mereka. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil hasil panen yang dapat dijual dengan harga ketetapan Jepang pula sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga para kaum tani (Reid, 2014).

Dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penderitaan petani di bawah sistem wajib serah padi. Lebih mudahnya, ambillah seorang kasus petani yang menggarap sawah seluas 0,5 hektar. Petani seperti ini dianggap sebagai mewakili petani Jawa. Karena rata-rata panen per hektar adalah 22,19 kuintal pada 1940, yakni di masa Jawa menikmati hasil panen yang luar biasa baik, cukup

masuk akal diperkirakan bahwa rata-rata hasil panen dari sawah seluas 0,5 hektar pada zaman pendudukan Jepang ini sekitar 10 kuintal. Sulit mengetahui seberapa jauh panen bergantung pada tenaga kerja orang lain. Akan tetapi, dengan menganggap ia sepenuhnya bergantung dan bahwa bawon (bagian untuk buruh panen) di daerah ini sebesar seperlima hasil maka seluruh bawon yang harus dibayarkan petani ini sebanyak 2 kuintal. Setelah membayar bawon, tersisa 8 kuintal. Dengan menganggap bahwa kuota penyerahan adalah 30% dari hasil panen maka ia menyerahkan 2,4 kuintal sehingga hanya tersisa 5,6 kuintal padi. Kalau ia mempunyai utang, ia harus melunasi dari 5,6 kuintal padi ini. Bila petani ini bernasib baik terbebas dari utang seluruh sisa padi bisa menjadi miliknya dengan catatan menyisihkan bibit sekitar 0,5 kuintal, setelah itu baru bisa dikonsumsi keluarganya tergantung berapa jumlah orang dalam satu rumah tangga tersebut (Kurasawa, 2016, p. 205).

Kenyataan pahit lainnya yang diterima petani ialah karena mereka tidak diberi kesempatan untuk membeli beras kembali di pasar. Untuk menutupi kekurangan beras, pemerintah mendorong rakyat supaya makan berbagai makanan pelengkap, serta memperkenalkan umumnya disebut sebagai "menu perjuangan" oleh kaum propaganda "bubur perjuangan" (terdiri dari campuran ubi, singkong, dan katul) dan "bubur Asia Raya". Berbagai jenis makanan yang sebelumnya tidak pernah muncul sebagai makanan pokok dianjurkan supaya dimanfaatkan. Di antaranya ialah bonggol dan batang pohon pisang dan pepaya, dan daun singkong. Daun pepaya dimasak dengan tanah atau kapur (kalsium) supaya rasa pahitnya hilang. Bekicot juga dianjurkan sebagai makanan pengganti sebagai protein pengganti. Makanan pengganti tersebut tentu saja tidak memuaskan, bahkan hina bagi orang Jawa. Mereka lebih suka makan nasi dibandingkan dengan makanan lainnya, dan bagi mereka nasi begitu penting dan sangat diperlukan sehingga sering berkata. "kalau belum makan nasi, berarti belum makan" (Sinar, 2011, p. 124).

Di atas puing-puing penderitaan, dalam jiwa setiap diri orang pasti ada untuk memberontak atas kesewenang-wenangan Jepang yang awalnya dianggap sebagai pembebas ternyata lebih kejam daripada kolonial Belanda (Ricklefs, 2012) Pemberontakan di zaman Jepang hanyalah sedikit saja, berikut salah satu contohnya. Pemberontakan petani ini terjadi di Indramayu, berawal dari penetapan wajib serah padi yang cukup tinggi dari kalangan petani untuk Jepang. Sementara kabupaten-kabupaten lain tidak setinggi yang ditetapkan kepada para petani di Indramayu. Karena segala cara sudah dilakukan untuk menanggulangi kebijakan Jepang, maka pada tahun 1944 para petani sudah tidak tahan lagi akibat kebijakan ini. Pemberontakan petani pun pecah, salah satu pemimpinnya ialah K.H. Irsyad-seorang guru agama yang dihormati di desanya-dan meminta air suci yang dapat memberikan kekebalan tubuh bagin siapa saja yang meminumnya. Dengan segala peralatan petani yang dimiliki digunakan untuk menghantam kafir Jepang penyembah matahari. Pemberontakan ini berjalan cukup sengit walaupun hanya berlangsung beberapa saat. Pada akhirnya pun, pemberontakan ini dapat diredam oleh pihak Jepang dan pemimpinnya kemudian disiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Era awal kemerdekaan merupakan sebuah euforia yang berapi-api dalam mendekolonisasi segala amalan, warisan Belanda. Rakyat Indonesia tidak suka segala hal yang berkaitan dengan Belanda, itu sebabnya gaung revolusi

kemerdekaan begitu dahsyatnya. Belanda yang kembali ke Indonesia dari September 1945 masih mengira rakyatnya masih sama tiga tahun belakangan, ternyata sudah balik melawan, ditambah pula pada November 1945 Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat X agar membentuk organisasi massa dan partai politik untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sudah disepakati (Kahin, 2013, p. 87).

Masa ini peperangan hebat terjadi di seluruh wilayah Indonesia, di satu sisi Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya, sementara Indonesia bersikukuh mempertahankan kemerdekaannya. Pada peristiwa banyak menelan korban jiwa antara kedua belah pihak dari semua kalangan. Hingga kemudian sengketa antara Indonesia dengan Belanda diselesaikan lewat PBB di Den Haag pada 27 Desember 1949 dua keputusan pentingnya ialah Indonesia berbentuk Serikat yang dikomandoi oleh Belanda dan persoalan Irian Barat diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan (Kahin, 2013). Tidak terima dengan keputusan ini, setahun kemudian Indonesia memutuskan hubungannya dengan Belanda, karena tidak sesuai dengan hajat hidup Indonesia merdeka. Memasuki dekade awal kemerdekaan Indonesia, organisasi petani sudah semakin mentereng walaupun belum bersifat independen, diantaranya PKI mempunyai organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI), Masyumi memiliki Serikat Tani Islam Indonesia (STII), PNI membentuk Persatuan Tani Indonesia (PETANI), PSI membentuk Gerakan Tani Indonesia (GTI), PRN membentuk Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), dan NU membentuk Persatuan Tani Nahdatul Ulama (Pertanu) (Rachman, 2017, p. 170).

Organisasi petani di bawah naungan partai politik juga menjadi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan setiap organisasi petani mempunyai program yang berbeda-beda. Misalnya Serikat Tani Islam Indonesia (STII) ingin memperbaiki kedudukan kaum tani, mempertahankan kedaulatan negara dan agam Islam tentunya, serta menyempurnakan susunan negara Indonesia, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Natsir sebagai ketua umum Masyumi saat mempunyai keyakinan bahwa Indonesia memang perlu industrialisasi, tetapi segala pertumbuhan mempunyai dinamikanya masing-masing. Indonesia adalah negara agraris yang tak bisa didesak untuk segera menjadi negara industri. Pertanian juga tidak harus dikembangkan seperti usulan Sukarno, yakni menggunakan teknologi sedini mungkin, itu akan berdampak buruk karena pengetahuan masyarakat setempat belum mumpuni untuk mengendalikan itu semua. STTI dalam hal ini sebenarnya tidak sedang menggusari Sukarno sebagai Presiden, hanya saja pengetahuan petani terlebih dahulu harus ditingkatkan supaya mampu menghadapi masa depan (Rachman, 2017, p. 172).

Sementara itu BTI di Medan, mengeksekusi tanah-tanah terlantar yang merupakan bekas industri perkebunan merupakan kesempatan bagi mereka yang berstatus tunawisma untuk mengklaim lahan-lahan tersebut. Tidak itu saja, anggota partai pun turut serta melakukan penyerobotan tanah. Diduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Medan melakukan penyerobotan tanah di sekitar areal perkebunan. Karena tindakan ini diketahui oleh pihak berwajib, akhirnya mereka ditangkap pun ditangkap. Terlepas beberapa anggota BTI ada yang ditangkap, sedari awal BTI dibentuk untuk memperoleh lahan-lahan dari kaum-kaum yang tamak atas penguasaan lahan. Hal ini juga menunjukkan aksi BTI telah membentangkan kesenjangan sosial yang sangat tajam (Rachman, 2017, p. 177).

Memang tidak terpungkiri juga bahwa PKI sebagai partai politik ingin mewujudkan suatu tatanan baru, berupa pembagian lahan secara merata supaya tidak terjadi kesenjangan sosial (Waspada, 1957). Praktik-praktik penyerobotan tanah ini dilaksanakan organisasi masyarakat, yakni Barisan Tani Indonesia (BTI) yang menjadi *underbouw* PKI. Secara beramai-ramai mereka datang membawa cangkul, parang, arit, dan peralatan lainnya lalu mengambil alih secara paksa lahan yang dimaksud, kemudian dijadikan mereka sebagai tempat bermukim (Sumatera, 1951). Pihak seperti SOBSI, Sarbupri, dan BTI dengan tegas menyatakan, bahwa mereka akan menghabiskan seluruh perusahaan tembakau di Medan, untuk memperoleh kesetaraan dalam kepemilikan tanah (Ikhsan, 2022, p. 154).

PKI lewat organisasi masyarakat, partisipan, dan afiliasi lainnya terus menolak kedatangan asing untuk menguasai lahan di Medan, secara cepat para petani mengokupasi lahan-lahan bekas perkebunan. Lewat pidato-pidato anggota partainya, agar supaya terus menolak produk-produk asing (Sumatera Mei 1955). Apalagi itu berasal dari Inggris dan Amerika yang merupakan induk kapitalis. Mereka menyeru masyarakat agar menolak feodalisme dan neo-kolonialisme (Rakyat, 1955). PKI juga mengkritik Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, komposisi kabinet yang disusun oleh pelaksana tugas negara saat ini kuranglah berkompeten. Hal ini akan berimbas pada pelaksana Pemilu 1955, yang ada kemungkinan ditunda lagi seperti masa-masa sebelumnya. Saat ini terlihat, Burhanuddin dan kabinetnya sedang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan Pemilu dalam waktu dekat. BTI juga meminta agar supaya Kabinet Burhanddddin Harahap dibubarkan karena tidak memihak kepada rakyat kecil, terlebih kepada para petani dan buruh (Waspada, 1955).

Di Jawa Timur okupasi tanah yang dilakukan oleh BTI ini rupanya mendapat sambutan dari Pertanu (Persatuan Tani Nahdatul Ulama) milik NU. Sebagai partai politik, NU yang paling menderita akibat aksi-aksi sepihak, kemudian Pertanu turun tangan untuk menghempang gerakan BTI, bentrokan pun tidak dapat terelakkan. Kekuatan inti partai maupun Pertanu terletak pada kyai, yang sebagian besar memiliki lahan luas. Ketika PKI lewat BTI meningkatkan aksi-aksinya, NU Jawa Timur mengeluarkan pernyataan politik yang keras, bahwa aksi-aksi sepihak ini bersifat kontra revolusioner dan kontra produktif terhadap tujuan-tujuan Soekarno. Lebih dari itu, selain menyatakan banyak anggota NU yang menjadi korban, pernyataan tersebut menyimpulkan NU masih bersabar terhadap provokasi berupa aksi-aksi sepihak itu. Sebenarnya, pernyataan itu memberi pesan yang tegas bahwa bila provokasi terus berlanjut akan mengundang aksi balasan dari anggota NU. Masalah yang ada sebenarnya jauh lebih rumit. Secara kelembagaan, kekayaan seorang kyai tidak dapat dipisahkan dari pesantren miliknya. Seringkali seseorang menyumbangkan sesuatu kepada kyai atau pesantren melalui kyai. Tanah wakaf sepenuhnya dikuasai oleh kyai (Sulistyo, 2017, p. 121).

Dalam aspek lain di Sumatera Timur, organisasi petani yang memperjuangkan tanah ulayatnya ialah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang berdiri pada 1953 atas inisiasi orang-orang Melayu (Sumatera, 1953). Mereka menganggap bahwa kedudukan tanah-tanah yang diokupasi oleh ormas-ormas lain berdasar pada ketidaktegasan pemerintahan. BPRPI juga sangat berhak terhadap tanah-tanah yang sedang menjadi sengketa, karena sedari awal sebahagian tanah yang diokupasi adalah milik masyarakat adat melayu. BPRPI kemudian melakukan

perlawan terhadap kebijakan pemerintah bukan dengan cara protes ke jalan atau memobilisasi massa, melainkan membuat pernyataan keberatan terhadap pihak pemerintah dan perkebunan. Hal ini sudah melanggar hak-hak adat orang Melayu dan justru merugikan golongan rakyat miskin yang saat itu sedang mengalami keterpurukan (Agustono, 1995, p. 65).

Dengan demikian, potret organisasi petani di bawah partai politik ialah menjadi sebagai perantara untuk mencapai tujuan-tujuan politik, walaupun terkesan independen, namun kenyataannya orang-orang partailah yang menjadi garda terdepan dalam merealisasikan program organisasi petani. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa BTI melakukan okupasi tanah terhadap tanah-tanah bekas perkebunan diinisiasi oleh tokoh-tokoh PKI. Demikian pula bentrokan yang terjadi antara BTI dan Pertanu di Jawa Timur kesemuanya itu membela masing-masing partainya. Bagaimana jamur di musim penghujan, secara beramai-ramai rakyat datang untuk menduduki lahan tersebut, walaupun tidak terpungkiri pula bahwa sudah banyak juga rakyat yang mendiami lahan tersebut sebelum Indonesia merdeka, hingga mereka usahakan sampai awal dekade kemerdekaan. Peristiwa seperti ini terus berjalan sampai pada puncaknya terjadi pembunuhan enam jenderal dan satu perwira yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 dan menjadi cikal bakal lahirnya Orde Baru (Ricklefs, 2012, p. 282).

Sejak pemerintahan Orde baru Soeharto berkuasa organisasi petani di luar milik pemerintah “dikomuniskan”, hal itu membuat rakyat kecil takut berorganisasi, karena bila ikut berorganisasi yang menyangkut petani, sudah dipastikan nyawa telah di ujung tanduk. Terkait organisasi petani di masa kepemimpinannya Soeharto membentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang merupakan wadah tunggal utama petani. Di samping itu, organisasi lain dibentuk pemerintah orde baru seperti Kelompok Tani Binaan Departemen Pertanian, Kelompencapir, Kelompok tani di daerah transmigrasi, Kelompok tani di daerah PIR perkebunan, Koperasi Unit Desa, Kelompok tani dan Nelayan Andalan (KTNA), organisasi-organisasi di daerah Irigasi (P3A). Sebagai wadah tunggal, HKTI bersifat politis (sebagai mesin politik orde baru untuk penyaluran aspirasi politik petani). Biasanya, pucuk pimpinan HKTI dijabat oleh kalangan militer yang dikaryakan atau birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, sejak Orde Baru berkuasa wadah para petani dalam menuangkan segala ide atau gagasan secara perlahan mulai lenyap (Harahap, 2000, 75).

Kesimpulan

Eksistensi petani pada panggung sejarah Indonesia dapat dikatakan hanya sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan bagi yang berkuasa. Petani tidak pernah sekalipun berdiri di atas kakinya sendiri untuk menentukan nasibnya secara otonom. Sejak penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia petani dipandang sebelah mata, padahal profesi inilah yang selalu memberi keuntungan bagi mereka. Walaupun nasib petani pernah berubah dalam satu waktu yang singkat di masa kemerdekaan karena berpartisipasi penting pada kontestasi politik saat itu, seperti terbentuk organisasi Pertanu, STTI, BTI, dan lain sebagainya. Patut disayangkan usaha dalam menyokong petani supaya mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidaklah berjalan mulus karena kemudian menghasilkan friksi dengan kelompok tani lainnya. Sampai kemudian Orde Baru

pun lahir pada tahun 1966, segala jenis organisasi yang berkaitan dengan petani pun dikomunikasikan. Akhirnya, petani kembali ke fase awal, petani kembali dipandang sebagai profesi rendah dan terkadang memalukan, terutama bagi generasi berusia di bawah 30 tahun. Dampaknya di masa sekarang ini ialah orang-orang semakin sedikit yang ingin berprofesi sebagai petani. Padahal, jika ditinjau jauh ke belakang, Indonesia sebenarnya tidak akan pernah berdiri tanpa intervensi dari para petani.

Referensi

- Agustono, B. (1995). *Kebijakan Perburuhan di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Akatiga.
- Alfian, I. (2016). *Perang Aceh: Perang di Jalan Allah*. Yogyakarta: Ombak.
- Benda, H. J. (1956). The beginnings of the Japanese occupation of Java. *The Journal of Asian Studies*, 15(4), 541-560. <https://doi.org/10.2307/2941923>.
- Berger, L. P. (1957). *Sedjarah Sosiologis-Ekonomis Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Breman, J. (2015). *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java*. Amsterdam: Brill.
- Harahap, H. (2000). Realitas Petani dan Organisasi Petani di Media Massa: Hegemoni Negara dalam Wacana Media. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Harian Rakyat, 15 Agustus 1955.
- Ikhsan, E. (2022). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta: YOI.
- Indisch Courant, 22 Agustus 1951.
- Kahin, G. Mc T. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Koran Sumatera, 16 Agustus 1951.
- Koran Sumatera, 25 Agustus 1953.
- Koran Sumatera, 31 Mei 1955.
- Koyagi, M. (2013). The Hajj by Japanese Muslims in the Interwar Period: Japan's Pan-Asianism and Economic Interests in the Islamic World. *Journal of World History*, 24(4), 849-876. <http://www.jstor.org/stable/43818413>.
- Kurasawa, A. (2016). *Propaganda Media on Java under the Japanese 1942-1945*. Cornell: Cornell University Press.
- Leirissa, R. Z., et al. (2017). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- McVey, R. (1995). Change and continuity in Southeast Asian studies. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1), 1-9. <https://doi.org/10.1017/S0022463400010432>.
- Pelzer, K. (2016). *East Sumatra' Growth: Planter Aand Peasant, Population and Comuunications*. Nomor 4. Leiden: Brill.

- Rachman, N. F. (2017). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Reid, A. (2014). *Sumatra: Revolution and Traditional Elite*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural, and Religious History*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Ricklefs, M.C. (2019). The Sweat of the King: State Wealth vs. Private Royal Wealth in Pre-colonial Islamic Javanese Kingdoms. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 175(1), 59-66. <https://doi.org/10.1163/22134379-17501020>.
- Sidel, J. T. (2021). *Soekarno and the Promise of Nasakom from Rust en Orde through the Pacific War, 1926–1945*. Cornell: Cornell University Press.
- Sinar, T. L. (2011). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Sinar Budaya.
- Soemardjan, S. (2015). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Stenberg, J., & Minasny, B. (2022). Coolie Legend on the Deli Plantation: Tale, Text, and Temple of the Five Ancestors. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 178(2-3), 159-191. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10037>.
- Sulistyo, H. (2017). *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: Pensil.
- Waspada, 13 Oktober 1955.
- Waspada, 20 Juni 1951.